

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan negara yang memiliki beragam potensi yang berbeda-beda di setiap daerahnya. Dalam menghadapi keadaan tersebut maka dilakukan upaya pembangunan yang lebih merata di masing-masing daerah tersebut. Untuk melakukan pembangunan ini tidak terlepas dari pembangunan daerah yang menjadi salah satu bagian yang terpenting dari pembangunan nasional itu sendiri. Sehingga setiap daerah diharapkan dapat mengetahui segala potensi yang dapat menjadi kebutuhan daerahnya.¹ Dengan tujuan untuk mengembangkan potensi daerah tersebut agar mampu mencapai keseimbangan laju pertumbuhan antar daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat itu sendiri.

Dalam melakukan pembangunan daerah untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencapai tujuan yang diinginkan maka sangat ditentukan oleh kemampuan pemerintah daerah dalam pembiayaan dan membiayai pembangunan itu sendiri karena diperlukan anggaran atau dana yang tidak sedikit sehingga diperlukan upaya ekstensifikasi dan intensifikasi untuk menggali sumber-sumber pendapatan daerah, baik pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain pendapatan yang sah.

¹ Hidayati Sania dkk, "Pengaruh Jumlah Penduduk, Produk Domestik Regional Bruto dan Inflasi Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Pada Kabupaten dan Kota Di provinsi Jawa Tengah", *Permana* Vol. IX No. 2, (2018), hal. 74

Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menandakan lahirnya kebijakan desentralisasi dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk dituntut lebih mandiri dalam mengurus urusan pemerintahannya, hal ini disebut dengan otonomi daerah. Kebijakan ini telah diberlakukan sejak awal tahun 2001 di Negara Indonesia. Penyelenggaraan otonomi daerah ini kemudian di dukung melalui penyediaan sumber-sumber pendanaan oleh pemerintah pusat yang diatur dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah yaitu pendapatan daerah dan pembiayaan.²

Tujuan dari pada otonomi daerah adalah meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan daerah, terutama dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat serta meningkatkan pembinaan kestabilan politik dan kesatuan bangsa.³ Pada dasarnya terdapat tiga misi utama sehubungan dengan pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi, yakni : (1) Menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah. (2) Meningkatkan kuantitas pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat. (3) Memberdayakan dan menciptakan ruang gerak bagi masyarakat untuk ikut serta dalam proses pembangunan.⁴

² Dian Purnama Sari, "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah di Provinsi Bengkulu", Jurnal Akuntansi Vol. 6, No. 1 (2016), hal. 76

³ Pidelis Murib dkk, "Pengaruh Pendapatan Perkapita, Jumlah Perusahaan dan Jumlah Penduduk Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Nabire Papua Tahun 2004-2013", Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi, Volume 16 No. 01, (2016), hal. 840

⁴ Karlina Batik, "Analisis Pengaruh Investasi, PDRB, Jumlah Penduduk, Penerimaan Pembangunan, dan Inflasi Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Lombok Barat", Jurnal Ekonomi Pembangunan, Vol 11 No. 01, (2013), hal. 116

Untuk itu, sejalan dengan pelaksanaan otonomi Daerah bahwa pemerintah daerah dari waktu ke waktu harus dituntut untuk lebih mandiri dalam segi operasional pembiayaan daerah tidak boleh mengandalkan lagi dana dari pemerintah pusat dan penerimaan Pendapatan Daerah yang berasal dari Pajak Daerah, Retribusi daerah dan lain-lain pendapatan yang sah dari waktu ke waktu, senantiasa perlu ditingkatkan. Hal ini dimaksudkan agar supaya terwujudnya kemandirian anggaran untuk membiayai pelaksanaan pembangunan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini, maka masing-masing daerah dapat dengan bebas menjalankan setiap kegiatannya melalui potensi yang dimiliki setiap daerah tersebut dalam mendapatkan dan memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah sebagai sumber pembiayaan pemerintah daerah, PAD dapat dihasilkan melalui beberapa sumber penerimaan yaitu hasil pajak daerah, retribusi daerah, perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.⁵ PAD ini merupakan salah satu indikator dari penerimaan daerah itu sendiri dalam mewujudkan kemandirian keuangan pemerintah daerah. Dalam hal ini, PAD diharapkan dapat menjadikan sumbangsih yang utama bagi penyelenggaraan dan pembangunan pemerintahan.

⁵ Carunia Mulya Firdausy, *Kebijakan dan Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dalam Pembangunan Nasional*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2018), hal. 20

Dalam setiap daerah apabila mempunyai perolehan PAD yang tinggi, maka tingkat kemandirian yang diperoleh dari daerah tersebut akan semakin tinggi pula khususnya pada tingkat kemandirian ekonomi sehingga dapat dikatakan daerah tersebut mempunyai tingkat perekonomian yang baik. Akan tetapi, ada juga dari fakta yang terjadi dalam suatu wilayah, masih sulit dalam menyeimbangkan jumlah PAD, sehingga ketidakseimbangan ini akan dapat menimbulkan ketidakmerataan pembangunan daerah. Dimana faktor penyebab terjadinya adalah adanya perbedaan potensi yang dimiliki pada setiap daerah.

Dan setiap daerah pastinya berlomba-lomba untuk meningkatkan Pendapatan Daerahnya masing-masing, dengan memanfaatkan atau mengelola beberapa potensi yang berada di daerah nya masing-masing. Salah satunya di lingkungan pemerintah daerah Kota Blitar khususnya Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Blitar mengelola beberapa jenis pajak daerah yang terdiri dari pajak hotel, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak parkir, pajak air tanag, pajak sarang burung walet (khusus pajak sarang burung walet di kota blitar tidak ada potensinya), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Dengan hal ini diharapkan Pemerintah Daerah Kota Blitar bisa mewujudkan kemandirian anggaran untuk membiayai pelaksanaan pembangunan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Adapun perolehan Pendapatan Asli Daerah yang menjadi obyek penelitian di wilayah Kota Blitar dalam periode 2011-2018 :

Gambar 1.1

**Tingkat Perkembangan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran
2011 - 2018**

Tahun	Target	Realisasi	%
2011	49,117,779,873.00	52.598.069.707,39	97.37
2012	55,966,506,013.56	63.673.317.690,63	113.77
2013	56,370,063,897.15	72.682.191.531,86	118.49
2014	85,721,323,251.70	100.523.481.296,52	117.27
2015	100,047,757,160.53	120.885.637.871,52	120.83
2016	120,126,343,300.00	132.924.257.091,93	110.65
2017	150,216,068,717.88	176.282.859.561,33	117.35
2018	155,482,930,452.05	162.287.324.562,51	104.38

Sumber : Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Blitar

Dari data diatas dapat dilihat bahwasanya presentase realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Blitar yang di hasilkan cenderung fluktuatif atau berubah-ubah. Akan tetapi, presentasi pencapaian realisasi yang cenderung menurun dari tahun ke tahun itu tidak menggambarkan kegagalan atau tingkat keberhasilan pemungutan atau pengelolaan potensi daerah kota Blitar yang ada dari tahun ke tahun menurun juga. Hal ini justru membuat atau menggambarkan keberhasilan perencanaan Pemerintah Daerah Kota Blitar dalam presisi yang tinggi, dan perhitungan antara target dengan data potensi yang benar-benar mendekati angka kondisi real yang sebenarnya.

Selain itu, potensi dan faktor-faktor yang mempengaruhi pemungutan benar-benar di perhitungkan dengan matang baik peluang maupun hambatan-hambatan nya. Hal itu bisa di lihat dari kenaikan target dari tahun ke tahun kenaikannya

cukup signifikan, karena dalam perjalanan waktu dalam rentang tahun ke tahun tersebut sudah mulai teridentifikasi permasalahan hambatan-hambatan dan solusi penanganan yang dilakukan secara bertahap dan terus membaik, akhirnya realisasi target dapat tercapai sesuai dengan potensi yang sebenarnya. Adapun upaya yang dilakukan bisa melalui ekstensifikasi dan intensifikasi perolehan pendapatan.

Potensi keuangan daerah, merupakan salah satu kekuatan dalam menghasilkan sejumlah penerimaan pendapatan. Selain itu, untuk melihat potensi sumber penerimaan daerah dibutuhkan faktor-faktor yang dapat di kendalikan (yaitu faktor-faktor kebijakan dan kelembagaan) dan yang tidak dapat dikendalikan (variabel-variabel ekonomi) yang dapat mempengaruhi kekuatan sumber-sumber penerimaan daerah itu sendiri. Adapun beberapa faktor-faktor tersebut antara lain kondisi awal suatu daerah, peningkatan cakupan, perkembangan PDRB, pertumbuhan penduduk, tingkat inflasi, pembangunan baru, dan sumber pendapatan baru.

Naik atau turunnya pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah sangat dipengaruhi oleh beberapa kegiatan ekonomi yang dilakukan masyarakatnya yaitu dalam menghasilkan barang maupun jasa yang diperlukan bagi kebutuhan hidup masyarakat itu sendiri, salah satunya dapat diindikasikan dengan jumlah penduduk dan PDRB, keduanya merupakan faktor yang mempengaruhi pendapatan, dimana Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) yang berasal dari PAD di bagi dengan jumlah penduduk yang ada di wilayah tersebut.

Jumlah penduduk merupakan banyaknya orang yang mendiami suatu wilayah negara.⁶ Menurut Sukirno dalam bukunya penduduk merupakan unsur penting dalam kegiatan ekonomi serta usaha membangun suatu perekonomian, karena penduduk menyediakan tenaga kerja, tenaga ahli, pemimpin perusahaan tenaga kerja usahawan dalam menciptakan kegiatan ekonomi.⁷ Jadi dengan bertambahnya penduduk maka jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan untuk menumbuhkan perekonomian akan mudah didapatkan, dan dengan bertambahnya penduduk maka akan memperluas pangsa pasar. Dikarenakan hal ini dapat meningkatkan permintaan terhadap produk serta akan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu. Selain itu, PDRB merupakan aspek penting dalam pertumbuhan ekonomi dalam suatu daerah dalam kurun waktu tertentu. Artinya jika PDRB ini dibagi dengan jumlah penduduk yang ada di daerah akan menghasilkan tingkat pendapatan perkapita, yang digunakan sebagai indikator untuk membandingkan tingkat kemakmuran materiil suatu daerah terhadap daerah lainnya.

Salah satu komponen yang berpengaruh dalam PDRB adalah Inflasi. Inflasi merupakan keadaan perekonomian suatu negara atau daerah yang mengalami pertumbuhan yang sangat cepat dari apa yang telah dibutuhkan.

⁶ Alam S, *Ekonomi*, (Jakarta: PT. Gelora Aksara Pratama, 2007), hal. 3

⁷ Novri Silastri, "Pengaruh Jumlah penduduk dan pendapatan domestik regional bruto (PDRB) terhadap kemiskinan di Kabupaten Kuantan Singingi, JOM Fekom Vol. 4 No. 1 (Februari) 2017, hal. 109

Dalam hal ini inflasi akan sangat berperan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang penetapannya di dasarkan pada omset penjualan, dan omset penjualan ini akan sangat berpengaruh pada pendapatan pajak hotel dan pajak restoran..

Dan untuk mengontrol agar tidak terjadinya inflasi adalah membuat beberapa kebijakan, salah satunya kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal merupakan kebijakan ekonomi yang dilakukan oleh pihak pemerintah guna mengelola dan mengarahkan kondisi perekonomian ke arah yang lebih baik atau yang diinginkan dengan cara mengubah atau memperbaharui penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), fiskal berkaitan dengan urusan pendapatan negara atau pajak. Disini pajak berperan sebagai sarana untuk mengendalikan laju inflasi karena naiknya tarif pajak bisa mengurangi tingkat konsumsi rumah tangga perusahaan. Selain itu, jika tarif pajak naik maka tingkat pendapatan daerah atau PAD akan mengalami kenaikan yang signifikan. Pajak tersebut salah satunya adalah pajak daerah, dimana pajak daerah akan sangat mempengaruhi tingkat penerimaan PAD, mengingat bahwasanya pajak daerah memiliki potensi yang cukup besar pada pendapatan daerah.

Selain pajak, pendapatan daerah juga didapatkan dari Retribusi Daerah yang telah dijelaskan sebelumnya. Terdapat beberapa komponen yang terdapat dalam Retribusi Daerah salah satunya Retribusi Pasar. Dimana retribusi pasar memberikan peranan yang cukup untuk meningkatkan penerimaan retribusi daerah. Hal ini di karenakan keberadaan pasar di setiap daerah pastinya

memiliki jumlah yang cukup, dan di pasar pastinya setiap hari terjadi sebuah transaksi yang dilakukan oleh penjual dan pembeli. Maka dari itu bagi para pihak yang melakukan transaksi tersebut di pungut biaya karena menggunakan pasar sebagai tempat transaksinya. Dalam hal ini retribusi pasar sangat berpengaruh pada retribusi daerah dan pendapatan daerah.

Dalam islam pembangunan ekonomi sangat penting dalam mewujudkan keadilan dan pemerataan (*justice*) dengan tujuan untuk kesejahteraan masyarakatnya. Pembangunan dalam islam bukan hanya didasarkan pada pembangunan yang bersifat materiel saja, tetapi juga didasarkan pada segi spiritual dan moral disini sangat berperan. Dalam hal ini, pembangunan moral dan spiritual harus terintegrasi dengan pembangunan ekonomi.⁸ Selain itu, disini peran masyarakat juga sangat diperlukan dalam membangun aspek moral dan spiritual itu sendiri.

Untuk mewujudkan pembangunan ekonomi yang merata dan kesejahteraan masyarakat maka di perlukan dana dari penerimaan pemerintah, yang akan di implementasikan melalui keuangan publik. Islam menekankan dalam pencapaian pemerataan dan kesejahteraan yang bersumber dari keuangan publik harus dikelola secara optimal, demi kebutuhan dan kemakmuran generasi yang berkesinambungan, meningkatkan kemsalahatan umat serta tidak boleh berlebihan (*extravaganza*).

Dalam pembangunan keuangan publik dapat dimulai dari sumber daya yang bersifat mikro. Konsep *istihlaf* atau tanggung jawab serta amanah dalam

⁸ Nurul Huda, dkk, *Ekonomi Pembangunan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2015), hal. 20-21

setiap individu, atau perusahaan dapat dijadikan sebagai faktor penting yang dijadikan landasan kebijakan negara dalam pembangunan sosio-ekonomi. Dan sumber daya yang melimpah dalam suatu masyarakat atau Negara akan terbangun secara maksimal apabila di dasarkan pada konsep *istihlaf*. Sebaliknya jika sumber daya keuangan publik seperti pajak dan zakat akan tidak menjadi maksimal apabila konsep *istihlaf* tidak terbangun dalam masyarakat itu sendiri.⁹

Kurangnya tingkat kesadaran masyarakat akan pajak maupun zakat dan kurangnya masyarakat dalam merespon, mengetahui perosedur serta pembayaran pajak. Selain itu, keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) dari segi kuantitas maupun kualitas, regulasi serta sarana prasarana. Hal ini dapat mengakibatkan tidak optimalnya dalam penggunaan keuangan publik oleh pemerintah, dikarenakan tidak tercapainya target ataupun realisasi yang diperlukan. Dan apabila penggunaan keuangan publik tidak maksimal dalam realisasinya, maka akan berdampak pada pengeluaran pemerintah yang akan di gunakan untuk pembangunan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Seperti dijelaskan pada Kitab Suci Al-Qur'an Allah SWT berfirman dalam Surat At-Taubah ayat 29 :

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ

أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ - ٢٩

⁹ Ahmad Dahlan, "Format Keuangan Publik yang Islami", Jurnal Ekonomi Islam, Volume IV No. 1, (2010), hal. 133-134

*Artinya : “ Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian, mereka yang tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan Allah dan Rasul-Nya dan mereka yang tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang telah diberikan Kitab, hingga mereka membayar jizyah (pajak) dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk”.*¹⁰

Dalam ayat diatas menjelaskan bahwa Allah SWT memerintahkan kepada hamba-hamba-Nya yang beriman untuk patuh dalam membayar jizyah. Dengan adanya ayat tersebut diharapkan masyarakat bisa tertib dalam membayar pajak, dikarenakan jika masyarakat sudah tertib administrasi pajak maka realisasi keuangan publik akan menjadi optimal. Hal ini akan mewujudkan tercapainya pembangunan ekonomi yang merata, sehingga dapat tercapainya tingkat kesejahteraan dalam masyarakat.

Oleh karena itu, peran masyarakat disini sangat dibutuhkan untuk meningkatkan penerimaan atau pendapatan daerah dan pemerintah disini juga harus menciptakan suatu kondisi ekonomi yang bisa dinikmati oleh semua lapisan masyarakat, jadi kedua objek ini harus saling berkontribusi untuk menciptakan pembangunan ekonomi yang merata. Dalam hal ini kebijakan pembangunan ekonomi harus di titik beratkan pada sektor ekonomi riil yang secara langsung maupun tidak langsung turun ke rakyat menengah ke bawah atau kurang mampu, antara lain dalam bentuk infrastruktur maupun non infrastruktur yaitu seperti jalanan umum, fasilitas pendidikan, fasilitas

¹⁰ <http://quran.kemenag.go.id>, At-Taubah ayat 29, Diakses pada 27 Februari 2020

kesehatan, nikah massal, sunatan massal, dan BOS dan lain sebagainya, untuk digunakan sebagai prasarana dasar dalam pembangunan ekonomi.

Peningkatan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat mempengaruhi kondisi keuangan daerah, jika penerapan pembangunan tidak sesuai dengan penerapan pembangunan maka akan mengakibatkan anggaran pendapatan daerah yang diperoleh tidak mencukupi kebutuhan daerah tersebut, di khawatirkan terjadinya pendistribusian yang tidak merata. Hal ini berbanding terbalik dari konsep islam, islam tidak memperbolehkan pembangunan ekonomi yang bersifat tidak merata, dikarenakan dapat menyebabkan ketidakadilan dalam masyarakat terutama masyarakat menengah kebawah atau kurang mampu dan tidak terealisasinya pembangunan dengan baik.

Alasan peneliti dalam melakukan penelitian ini yaitu Pendapatan Asli Daerah berperan sangat penting dalam terlaksananya pembangunan daerah. Dengan adanya segala potensi daerah yang dimiliki Kota Blitar dengan diikuti perkembangan dalam mengelolanya akan memberikan wujud hasil positif dari adanya otonomi daerah. Hasil itu berupa kemampuan dalam mengelola keuangan daerahnya dengan baik, efektif dan efisien yang tercermin melalui besarnya pertumbuhan PAD. Dengan pemanfaatan potensi yang dimiliki oleh Kota Blitar secara optimal akan memberikan peluang lebih terhadap besarnya perolehan PAD melalui pajak ataupun retribusi, sehingga tidak lagi bergantung pada pemerintah pusat.

Berdasarkan fenomena di atas, perlunya diadakan sebuah penelitian untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Jumlah Penduduk, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Tingkat Inflasi, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Retribusi pasar terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan tingkat realisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Blitar mengalami fluktuatif dari tahun 2015-2019. Membuat peneliti ingin melihat **“Pengaruh Jumlah Penduduk, PDRB, Inflasi, Retribusi Pasar dan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kota Blitar (Perspektif Ekonomi Islam)”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, terdapat beberapa masalah yang akan dijadikan sebagai acuan untuk bahan penelitian ini, yaitu :

1. Minim nya tingkat kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap pembayaran pajak, sehingga hal tersebut dapat mempengaruhi tingkat Pendapatan Asli Daerah (PAD)
2. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) dari segi kuantitas maupun kualitas, regulasi serta sarana prasarana.
3. Meningkatnya tingkat inflasi, hal ini dapat menjadikan ketidakstabilan dalam ekonomi dan dapat mempengaruhi tingkat pendapatan daerah.
4. Turunnya tingkat pendapatan daerah akan mengakibatkan kurangnya tingkat kesejahteraan atau kemslahatan bagi masyarakat.

Dari beberapa identifikasi masalah yang dipaparkan di atas, maka perlu mengetahui potensi sumber-sumber Pendapatan Daerah yakni dibutuhkan

pengetahuan tentang analisis perkembangan beberapa indikator makro ekonomi diantaranya Jumlah Penduduk, PDRB, Inflasi, Retribusi Pasar dan Pajak Daerah. Dimana peningkatan Jumlah Penduduk, PDRB, Inflasi, serta besarnya perolehan Retribusi Pasar dan Pajak Daerah ini dapat menentukan besarnya tingkat Pendapatan Daerah yang akan dihasilkan. Selain itu jika Pendapatan Daerah meningkat maka akan terciptanya suatu kesejahteraan masyarakat.

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Apakah Jumlah Penduduk berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Blitar ?
2. Apakah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Blitar ?
3. Apakah tingkat Inflasi berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Blitar ?
4. Apakah Retribusi Pasar berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Blitar ?
5. Apakah Pajak Daerah berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Blitar ?
6. Apakah Jumlah Penduduk, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Inflasi, Retribusi Pasar dan Pajak Daerah berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Blitar ?

7. Apakah Jumlah Penduduk, PDRB, Inflasi, Retribusi Pasar dan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kota Blitar berdasarkan Perspektif Ekonomi Islam?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menguji apakah Jumlah Penduduk berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Blitar.
2. Untuk menguji apakah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Blitar.
3. Untuk menguji apakah Inflasi berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Blitar.
4. Untuk menguji apakah Retribusi Pasar berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Blitar.
5. Untuk menguji apakah Pajak Daerah berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Blitar.
6. Untuk menguji apakah Jumlah Penduduk, PDRB, Inflasi, Retribusi Pasar dan Pajak Daerah berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Blitar.

7. Untuk menguji apakah Jumlah Penduduk, PDRB, Inflasi, Retribusi Pasar dan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kota Blitar berdasarkan Perspektif Ekonomi Islam.

E. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara teoritis : penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan. *Pertama* bagi Akademisi, memberikan sumbangsih hasil pemikiran mengenai permasalahan apakah Jumlah Penduduk, PDRB, Inflasi, Retribusi Pasar dan Pajak Daerah berpengaruh baik secara simultan maupun parsial terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kota Blitar ditinjau dari perspektif Ekonomi islam. Menambah literatur mengenai hal tersebut bagi lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, khususnya jurusan ekonomi syariah. *Kedua* bagi penulis, menambah wawasan mengenai pengaruh Jumlah Penduduk, PDRB, Inflasi, Retribusi Pasar dan Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah dalam perspektif ekonomi islam.
2. Secara praktis : penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan. *Pertama*, bagi Pemerintah agar dapat melakukan peningkatan terhadap Pendapatan Asli Daerah di kota Blitar sehingga dapat membiayai pembangunan ekonomi daerah secara umum terus mengoptimalkan potensi yang dapat meningkatkan penerimaan daerah kota Blitar. *Kedua*, bagi masyarakat agar dapat memperoleh pengetahuan

mengenai pengaruh Jumlah Penduduk, PDRB, Inflasi, Retribusi Pasar dan Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Blitar dalam perspektif ekonomi islam.

F. Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian

Untuk memperjelas ruang lingkup dan batasan penelitian yang akan dibahas dan untuk menghindari permasalahan-permasalahan yang timbul dalam penelitian ini, maka peneliti membatasi ruang lingkup dan batasan penelitian sebagai berikut :

1. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam penelitian ini berfokus pada variabel independent atau bebas (X) dan variabel dependent atau terkait (Y). Variabel independent dalam penelitian ini adalah Jumlah Penduduk (X_1), PDRB (X_2), Inflasi (X_3), Retribusi Pasar (X_4) dan Pajak Daerah (X_5) dengan variabel dependent nya (Y) yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD)

2. Batasan Penelitian

Peneliti ini berfokus pada Pengaruh Jumlah Penduduk, PDRB, Inflasi, Retribusi Pasar dan Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kota Blitar Perspektif Ekonomi Islam. Dan objek penelitian ini berfokus pada Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar.

G. Penegasan Istilah

Dalam karya ilmiah ini penelitian perlu memberi penegasan istilah dari judul yang peneliti angkat dengan tujuan agar tidak terjadi kesalah pahaman dalam membaca skripsi ini, yaitu :

1. Definisi Konseptual

a. Jumlah Penduduk

Sudah sejak lama masalah kependudukan menjadi perhatian manusia. Banyak negarawan ataupun para ahli yang memperbincangkan besarnya jumlah penduduk yang seimbang berdasarkan pertimbangan politik, sosial, dan ekonomi. Menurut Malthus, jumlah penduduk bertambah sesuai dengan deret ukur (1,2,3,4,8,16,32,64,128,256 dan seterusnya). Sedangkan pertumbuhan penduduk adalah terjadinya perubahan jumlah penduduk pada suatu wilayah, baik bertambah maupun berkurang. Pertumbuhan penduduk dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor kelahiran (*natalis*), kematian (*mortalitas*), dan perpindahan penduduk (*migrasi*).¹¹

b. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

PDRB didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah, atau merupakan jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di suatu wilayah.¹² Artinya, semakin tinggi pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah menandakan semakin

¹¹ Samadi, *Geografi 2 SMA Kelas XI*, (Yogyakarta: Yudhistira, 2007), hal. 31-35

¹² Puti Romhadhoni, dkk, “Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi DKI Jakarta”, *Jurnal Matematika Intregatif*, Vol 14 No.2, (2018), hal. 118

membaihnya kegiatan ekonomi yang dihasilkan dari daerah tersebut, dan pertumbuhan ekonomi daerah tersebut ditunjukkan dari laju pertumbuhan PDRB.

c. Inflasi

Inflasi merupakan fenomena ekonomi yang selalu menarik untuk dibahas terutama berkaitan dengan dampaknya yang luas terhadap makro ekonomi agregat, yakni : pertumbuhan ekonomi, keseimbangan eksternal, daya saing, tingkat bunga, dan bahkan distribusi pendapatan. Inflasi juga berperan dalam mempengaruhi mobilisasi dana lewat lembaga keuangan formal. Dalam banyak literatur disebutkan bahwa inflasi didefinisikan sebagai kenaikan harga umum secara terus-menerus dari suatu perekonomian di suatu negara.¹³

d. Retribusi Pasar

Retribusi Pasar. Objek retribusi disini adalah penyediaan fasilitas pasar, berbagai jenis barang, dan fasilitas pasar atau pertokoan yang dikontrakan, yang disediakan atau diselenggarakan oleh pemerintah daerah. dikecualikan dari objek retribusi adalah fasilitas pasar yang disediakan, dimiliki atau di kelola oleh BUMN, BUMD, serta pihak swasta.¹⁴

e. Pajak Daerah

¹³ Nurul Huda, *Ekonomi Makro Islam: Pendekatan Teoritis Edisi Pertama*, (Jakarta: KENCANA, 2008), hal. 175

¹⁴ Toman Sony Tambunan dan Wilson R.G. Tambunan, *Hukum Bisnis Edisi Pertama*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), hal. 316

Pajak daerah merupakan kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.¹⁵

f. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut UU No. 33 tahun 2004, pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan. pendapatan daerah menurut UU No. 32 Tahun 2004 menyatakan, bahwa sumber pendapatan atau penerimaan daerah salah satunya dari PAD. PAD adalah pendapatan yang bersumber dan dipungut sendiri oleh pemerintah daerah, sumber PAD terdiri dari : Pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.¹⁶

2. Definisi Operasional

Dari definisi secara konseptual sebagaimana diatas, maka secara operasionalnya dimaksudkan untuk mengetahui pengaruh jumlah penduduk, PDRB, Inflasi, Retribusi Pasar dan Pajak Daerah terhadap

¹⁵ Mardiasmo, *PERPAJAKAN Edisis Terbaru 2016*, (Yogyakarta: ANDI OFFSET, 2016), hlm. 14

¹⁶ Phaureulea Artha Wulandari dan Emy Iryanie, *Pajak Daerah Dalam Pendapatan Asli Daerah*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hal. 10-24

Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Blitar perspektif ekonomi Islam. Adapun yang menjadi indikator-indikator dalam penelitian ini adalah jumlah penduduk, PDRB, inflasi, Retribusi Pasar dan Pajak Daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta mensejahterakan masyarakat Kota Blitar.

H. Sistematika Penulisan Skripsi

Secara garis besar penulisan penelitian ini terdiri dari VI (enam) bab. Masing-masing bab memiliki sub bab yang akan memberikan penjelasan secara terperinci dan sistematis serta berkesinambungan agar bisa dipahami dengan jelas. Adapun sistematika penelitian ini adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN :

Pada bab ini berisi tentang latar belakang masalah yang membahas fenomena-fenomena terkait dengan judul penelitian, kemudian identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup dan keterbatasan penelitian, penegasan istilah dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini berisi tentang landasan teori yang membahas setiap variabel-variabel dalam penelitian, kajian penelitian terdahulu, kerangka berfikir penelitian dan hipotesis penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang pendekatan dan jenis penelitian, populasi, sampling dan sampel penelitian, sumber data, variabel dan skala

pengukurannya, teknik pengumpulan data dan instrumen penelitian ,
analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN

Bab ini berisi tentang hasil penelitian (yang berisi deskripsi data dan pengujian hipotesis).

BAB V PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi tentang pembahasan data penelitian dan hasil analisis data.

BAB VI PENUTUP

Bab ini berisi tentang daftar pustaka, lampiran-lampiran, surat pernyataan keaslian skripsi, dan daftar riwayat hidup.

Dan pada bagian akhir terdiri dari daftar rujukan, lampiran-lampiran, surat pernyataan keaslian skripsi dan daftar riwayat hidup.